

22 Februari 2024




# DOKUMEN 2024

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan

**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2024**

 <https://dinsos.bulelengkab.go.id>

 [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

 (0362) 21248

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2024. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

A circular official stamp in blue ink from the Social Services Office of Buleleng Regency. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG" around the perimeter and "DINAS SOSIAL" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

**J. Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	1
1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan ..	2
<b>BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....</b>	<b>4</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja .....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
<b>LAMPIARAN</b>	
1. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan 2024	

**DAFTAR TABEL**

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 .....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

#### **1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

### **1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan**

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan adalah:

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## BAB II

### RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

##### a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

##### b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin  
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS  
Indikator: Persentase penanganan PMKS

## 2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN	PENJELASAN			
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1 Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
		Meningkatnya	2 Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Buleleng

### 2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan.

### BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024. Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 22 Februari 2024  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Eselon II</b>										
1	Menurunnya penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	4,90	Januari	-	1 Program Pemberdayaan Sosial	2.978.641.819	Januari	2.876.271	Kepala Dinas
					Pebruari	-			Pebruari	331.300.000	
					Maret	-			Maret	183.350.000	
					April	-			April	302.563.016	
					Mei	-			Mei	174.700.000	
					Juni	-			Juni	174.700.000	
					Juli	-			Juli	934.376.266	
					Agustus	-			Agustus	174.700.000	
					September	-			September	174.700.000	
					Oktober	-			Oktober	177.576.266	
					Nopember	-			Nopember	173.900.000	
					Desember	4,90			Desember	173.900.000	
							2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	253.111.493	Januari	4.270.627	
									Pebruari	18.000.000	
									Maret	22.180.000	
									April	38.119.622	
									Mei	18.000.000	
									Juni	18.000.000	
									Juli	29.370.622	
									Agustus	18.000.000	
									September	18.000.000	
									Oktober	33.170.622	
									Nopember	18.000.000	
									Desember	18.000.000	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	%	9,86			1	Program Rehabilitasi Sosial	4.548.484.379	Januari	7.303.606			
										Pebruari	21.300.000			
										Maret	423.170.000			
										April	677.932.091			
										Mei	418.800.000			
										Juni	418.800.000			
										Juli	479.875.091			
										Agustus	418.800.000			
										September	418.800.000			
										Oktober	426.103.591			
										Nopember	418.800.000			
										Desember	418.800.000			
										2 Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12		Laporan	
		Pebruari	1											
		Maret	1											
		April	1											
		Mei	1											
		Juni	1											
		Juli	1											
		Agustus	1											
		September	1											
Oktober	1													
Nopember	1													
Desember	1													
3 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan								Januari	1			
										Pebruari	1			
										Maret	1			
										April	1			
										Mei	1			
										Juni	1			
										Juli	1			
										Agustus	1			
										September	1			
										Oktober	1			
										Nopember	1			
										Desember	1			



No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Januari	-	1	Program Penanganan Bencana	137.491.789	Januari	2.435.448	
						Pebruari	-				Pebruari	9.400.000	
						Maret	-				Maret	26.350.000	
						April	-				April	14.335.447	
						Mei	-				Mei	8.900.000	
						Juni	-				Juni	8.900.000	
						Juli	-				Juli	20.235.447	
						Agustus	-				Agustus	8.900.000	
						September	-				September	8.900.000	
						Oktober	-				Oktober	11.335.447	
						Nopember	-				Nopember	8.900.000	
						Desember	100				Desember	8.900.000	
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	%	100	Januari	-	1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.179.684.729	Januari	27.035.630	
						Pebruari	-				Pebruari	66.116.920	
						Maret	-				Maret	77.275.680	
						April	-				April	388.012.255	
						Mei	-				Mei	64.609.300	
						Juni	-				Juni	64.109.340	
						Juli	-				Juli	129.106.222	
						Agustus	-				Agustus	64.609.300	
						September	-				September	76.509.300	
						Oktober	-				Oktober	88.006.182	
						Nopember	-				Nopember	64.609.300	
						Desember	100				Desember	69.685.300	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1 Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.932.618.226	Januari	534.271.867	
					Pebruari	-			Pebruari	470.820.450	
					Maret	-			Maret	784.785.046	
					April	-			April	555.321.226	
					Mei	-			Mei	446.476.036	
					Juni	-			Juni	804.483.735	
					Juli	-			Juli	605.940.036	
					Agustus	-			Agustus	490.116.495	
					September	-			September	505.661.161	
					Oktober	-			Oktober	514.039.780	
					Nopember	-			Nopember	109.251.197	
					Desember	80			Desember	111.451.197	
<b>TOTAL ANGGARAN (RP)</b>								<b>15.030.032.435,00</b>		<b>15.030.032.435,00</b>	

Singaraja, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



**Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Eselon III</b>										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Laporan	1	Januari	-	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.447.478	Januari	2.511.874	Sekretaris
					Pebruari	-			Pebruari	9.275.000	
					Maret	-			Maret	9.200.000	
					April	-			April	15.486.868	
					Mei	-			Mei	9.200.000	
					Juni	-			Juni	9.200.000	
					Juli	-			Juli	11.186.868	
					Agustus	-			Agustus	9.200.000	
					September	-			September	9.200.000	
					Oktober	-			Oktober	11.186.868	
					Nopember	-			Nopember	8.700.000	
					Desember	1			Desember	12.100.000	
		2 Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan	12	Januari	1					
					Pebruari	1					
					Maret	1					
					April	1					
					Mei	1					
					Juni	1					
					Juli	1					
					Agustus	1					
					September	1					
					Oktober	1					
					Nopember	1					
					Desember	1					

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Eselon III</b>										
		3	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.719.333.173	Januari 479.067.345 Pebruari 346.339.338 Maret 684.315.398 April 396.824.821 Mei 360.505.343 Juni 689.860.038 Juli 459.971.139 Agustus 408.037.648 September 426.697.237 Oktober 406.514.866 Nopember 30.600.000 Desember 30.600.000	
		4	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1					
		5	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.704.082	Januari 2.812.037 Pebruari 2.812.036 Maret 10.562.034 April 16.974.797 Mei 9.812.029 Juni 27.812.033 Juli 8.488.951 Agustus 4.212.033 September 4.024.760 Oktober 6.969.306 Nopember 4.212.033 Desember 3.012.033	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Eselon III										
							2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.723.493	Januari 49.880.611 Pebruari 71.584.076 Maret 80.707.614 April 108.912.240 Mei 66.958.664 Juni 65.739.164 Juli 79.210.578 Agustus 68.666.814 September 65.739.164 Oktober 77.846.240 Nopember 65.739.164 Desember 65.739.164	
							3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.410.000	Januari - Pebruari 40.810.000 Maret - April 17.122.500 Mei - Juni 11.872.500 Juli 47.082.500 Agustus - September - Oktober 11.522.500 Nopember - Desember -	
<b>TOTAL ANGGARAN (RP)</b>								<b>5.932.618.226,00</b>	<b>5.932.618.226,00</b>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Eselon IV</b>									
1	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian	1	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Laporan	12	Januari	1	Laporan Administrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
						Pebruari	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Maret	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						April	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Mei	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Juni	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Juli	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Agustus	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						September	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Oktober	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Nopember	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Desember	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
2	Tersedianya laporan administrasi keuangan	1	Jumlah laporan administrasi keuangan	Laporan	12	Januari	1	Laporan Administrasi Keuangan	
						Pebruari	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Maret	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						April	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Mei	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Juni	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Juli	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Agustus	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						September	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Oktober	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Nopember	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Desember	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
3	Tersedianya laporan administrasi perkantoran	1	Jumlah laporan administrasi perkantoran	Laporan	12	Januari	1	Laporan Administrasi Perkantoran	
						Pebruari	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Maret	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						April	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Mei	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Juni	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Juli	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Agustus	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						September	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Oktober	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Nopember	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Desember	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Eselon III</b>											
1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	%	80	Januari	-	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2.978.641.819	Januari	2.876.271	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
					Pebruari	-				Pebruari	331.300.000	
					Maret	-				Maret	183.350.000	
					April	-				April	302.563.016	
					Mei	-				Mei	174.700.000	
					Juni	-				Juni	174.700.000	
					Juli	-				Juli	934.376.266	
					Agustus	-				Agustus	174.700.000	
					September	-				September	174.700.000	
					Oktober	-				Oktober	177.576.266	
					Nopember	-				Nopember	173.900.000	
					Desember	80				Desember	173.900.000	
		2	12	Laporan	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
					Desember	1						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1 Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	%	100	Januari	-	1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.179.684.729	Januari	27.035.630		
					Pebruari	-			Pebruari	66.116.920		
					Maret	-			Maret	77.275.680		
					April	-			April	388.012.255		
					Mei	-			Mei	64.609.300		
					Juni	-			Juni	64.109.340		
					Juli	-			Juli	129.106.222		
					Agustus	-			Agustus	64.609.300		
					September	-			September	76.509.300		
					Oktober	-			Oktober	88.006.182		
		Nopember	-	Nopember	64.609.300							
		Desember	100	Desember	69.685.300							
		2 Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
September	1											
Oktober	1											
Nopember	1											
Desember	1											
<b>TOTAL ANGGARAN (RP)</b>							<b>4.158.326.548,00</b>		<b>4.158.326.548,00</b>			



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Eselon III</b>													
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	9,86	Januari	-	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.475.788.076	Januari	6.349.528	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
						Pebruari	-				Pebruari	17.700.000	
						Maret	-				Maret	419.570.000	
						April	-				April	647.698.016	
						Mei	-				Mei	415.200.000	
						Juni	-				Juni	415.200.000	
						Juli	-				Juli	471.721.016	
						Agustus	-				Agustus	415.200.000	
						September	-				September	415.200.000	
						Oktober	-				Oktober	421.549.516	
						Nopember	-				Nopember	415.200.000	
						Desember	9,86				Desember	415.200.000	
		2	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	Januari	1	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	72.696.303	Januari	954.078	
						Pebruari	1				Pebruari	3.600.000	
						Maret	1				Maret	3.600.000	
						April	1				April	30.234.075	
						Mei	1				Mei	3.600.000	
						Juni	1				Juni	3.600.000	
						Juli	1				Juli	8.154.075	
						Agustus	1				Agustus	3.600.000	
						September	1				September	3.600.000	
						Oktober	1				Oktober	4.554.075	
						Nopember	1				Nopember	3.600.000	
						Desember	1				Desember	3.600.000	
<b>TOTAL ANGGARAN (RP)</b>								<b>4.548.484.379,00</b>	<b>4.548.484.379,00</b>				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Eselon III</b>													
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	%	100	Januari	-	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	253.111.493	Januari	4.270.627	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
						Pebruari	-				Pebruari	18.000.000	
						Maret	-				Maret	22.180.000	
						April	-				April	38.119.622	
						Mei	-				Mei	18.000.000	
						Juni	-				Juni	18.000.000	
						Juli	-				Juli	29.370.622	
						Agustus	-				Agustus	18.000.000	
						September	-				September	18.000.000	
						Oktober	-				Oktober	33.170.622	
						Nopember	-				Nopember	18.000.000	
						Desember	100				Desember	18.000.000	
		2	Jumlah laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	Januari	1						
						Pebruari	1						
						Maret	1						
						April	1						
						Mei	1						
						Juni	1						
						Juli	1						
						Agustus	1						
September	1												
Oktober	1												
Nopember	1												
Desember	1												

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1 Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	-	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	137.491.789	Januari	2.435.448	
					Pebruari	-			Pebruari	9.400.000	
					Maret	-			Maret	26.350.000	
					April	-			April	14.335.447	
					Mei	-			Mei	8.900.000	
					Juni	-			Juni	8.900.000	
					Juli	-			Juli	20.235.447	
					Agustus	-			Agustus	8.900.000	
					September	-			September	8.900.000	
					Oktober	-			Oktober	11.335.447	
					Nopember	-			Nopember	8.900.000	
					Desember	100			Desember	8.900.000	
		2 Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1					
					Pebruari	1					
					Maret	1					
					April	1					
					Mei	1					
					Juni	1					
					Juli	1					
					Agustus	1					
					September	1					
					Oktober	1					
					Nopember	1					
					Desember	1					
<b>TOTAL ANGGARAN (RP)</b>								<b>390.603.282,00</b>	<b>390.603.282,00</b>		

Singaraja, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

